

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Pada umumnya pertumbuhan ekonomi daerah saat ini masih bertumpu pada peningkatan belanja baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat. Namun yang berasal dari belanja pemerintah nampaknya masih relatif terbatas jika melihat alokasi terbesar APBD adalah untuk belanja pegawai. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi di daerah lebih mengandalkan pada konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah yang didorong oleh konsumsi sulit dijaga keberlangsungan dan kestabilannya karena sangat tergantung pendapatan perkapita masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah seperti itu tidak menunjukkan struktur perekonomian daerah yang kuat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan konsumsi akan kurang menciptakan nilai tambah dan dapat memicu peningkatan inflasi. Oleh karena itu dalam upaya menciptakan pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan, perekonomian daerah perlu didukung oleh kegiatan investasi di sektor produktif.

Mengingat adanya keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah termasuk Kota Salatiga maka investasi swasta memiliki peran strategis. Terdapat berbagai efek multiplayer yang diciptakan dari peningkatan investasi mulai dari meningkatnya pemanfaatan sumberdaya untuk kegiatan produksi, berkembangnya kegiatan perdagangan antar daerah, dan terciptanya nilai tambah yang lebih besar. Investasi daerah juga mendorong percepatan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Percepatan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mobilitas

sumberdaya berupa bahan mentah, barang modal, dan tenaga kerja secara lebih mudah dan murah.

Tumbuh kembangnya kegiatan investasi suatu daerah yang akan menjadi pendorong roda penggerak perekonomian daerah ditentukan dari aspek kemanfaatan yang diperoleh pihak investor, masyarakat dan pemerintah daerah. Pihak investor merasakan dari kegiatan investasi terjadi peningkatan produktivitas dan peningkatan keuntungan secara memadai. Sementara itu, bagi masyarakat melalui kegiatan investasi menciptakan lapangan pekerjaan, pembukaan lapangan usaha yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Bagi pemerintah, investasi akan meningkatkan aktivitas produksi, perdagangan dan jasa, upah dan daya beli yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumbangan PAD terhadap APDB di Kota Salatiga, pada rentang waktu 2013-2015 penerimaan PAD berkisar pada 13%-22% dari total penerimaan seperti yang terlihat pada Tabel 1.1. Hal ini dapat mengindikasikan Kota Salatiga dianggap sebagai daerah belum optimal menjalankan otonomi. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan PAD baik yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap potensi pendapatan daerah di Kota Salatiga.

**Tabel 1.1.** Tingkat Kemandirian Kota Salatiga Tahun 2013-2015 (dalam milyar Rp)

	2013	2014	2015	2016
Total Penerimaan	603,204	727,619	750,581	879,784
PAD	106,100	165,747	167,010	<b>203,768</b>
<b>Rasio Kemandirian</b>	<b>17,58%</b>	<b>13,57%</b>	<b>22, 25%</b>	<b>23,16%</b>

Sumber : Salatiga Dalam Angka, 2014-2106

Peningkatan PAD yang merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah (Basri et al., 2013). Dengan semangat otonomi tersebut ternyata telah membuat daerah-daerah memiliki obsesi yang sangat tinggi meningkatkan PAD (Partolo dan Yudha, 2012). Selama ini di kota-kota besar seperti Surabaya, pajak dan retribusi memiliki kontribusi yang secara signifikan terhadap PAD (Mustika, 2014). Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dituntut mampu meningkatkan pajak dan retribusi daerah, baik meningkatkan penerimaan sumber-sumber pajak dan retribusi yang ada maupun penggalan sumber yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dengan demikian semakin besar sumbangan pajak dan retribusi terhadap PAD dan pada gilirannya memiliki struktur APBD yang menunjukkan semakin mandiri atau semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah dan kegiatan investasi haruslah bersifat sinergitas. Pemerintah daerah seharusnya tidak sekedar berorientasi menghimpun pajak dan retribusi. Fokus yang berlebihan pada dua sumber PAD tersebut bisa menjadi bumerang bagi upaya peningkatan investasi karena akan cenderung menyebabkan bermunculan peraturan daerah bersifat kontraproduktif terhadap upaya peningkatan investasi dan tidak jarang menyebabkan eksodus investasi dari daerah yang bersangkutan ke daerah lain. Demikian juga upaya peningkatan investasi daerah tidak boleh mengabaikan upaya peningkatan pajak dan retribusi. Berdasarkan paparan diatas maka perlu ditelaah lebih lanjut mengenai kaitan perkembangan

investasi dan PAD khususnya komponen pajak dan retribusi daerah di Kota Salatiga.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Analisis Kebijakan Pro-investasi Berbasis Pajak dan Retribusi Daerah Kota Salatiga dimaksudkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pemangku kepentingan dalam upaya menarik investasi dan peningkatan pajak dan retribusi daerah secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Adapun rumusan masalah penelitiannya sebagai berikut :

- (a) Bagaimana kondisi masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah Kota Salatiga berdasarkan pertumbuhan dan kontribusinya?
- (b) Apa jenis pajak dan retribusi daerah Kota Salatiga yang memiliki keterkaitan perkembangan investasi ?
- (c) Apa saja permasalahan dan kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan investasi di Kota Salatiga?
- (d) Bagaimana kebijakan pro-investasi untuk masing jenis pajak dan retribusi daerah Kota Salatiga?